

EDISI : SELASA, 09 - April 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

Nama Media : *Nusa Bali*

Kategori : *Pajak*

Sikapi Protes Kenaikan PBB P2

BKD 'Lempar Bola' ke Dirjen Pajak

Koordinasi dilakukan dengan Dirjen Pajak karena pemberlakuan tarif baru sudah diterbitkan melalui Perda.

SINGARAJA, NusaBali

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Buleleng, berencana berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pa-

jak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, menyusul banyaknya keberatan atas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) akibat penyesuaian tarif Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Upaya itu dilakukan karena pemberlakuan tarif NJOP sudah diundangkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

Rencana tersebut diputuskan dalam rapat antara BKD dengan Inspektorat dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng, Senin (8/4) di kantor BKD Buleleng, Jalan Ngurah Rai Singaraja.

Sekretaris BKD Buleleng, Ni Made Susi Adnyani dikonfirmasi usai rapat mengatakan, dari pembahasan awal BKD baru menyusun draf pengurangan untuk menindaklanjuti keberatan yang diajukan wajib pajak. Penyusunan draf ini berdasarkan pertimbangan prinsip kepatutan terhadap regulasi yang mengatur dan berkeadilan. Ini karena, pungutan PBB P2 sendiri berdasarkan Undang-Undang (UU) diikuti Peraturan Daerah (Perda). Regulasi ini sudah diundangkan, sehingga wajib diterapkan.

Karena itu, BKD akan ber-

kordinasi ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP), agar keputusan yang akan diambil nantinya tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. "Kami baru melakukan rapat awal dan pada dasarnya setiap keberatan itu kita tindaklanjuti, dan keputusan dalam penetapan keberatan pajaknya sesuai prinsip kepatuhan dan berkeadilan," katanya.

Menurut Susi, sejak Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) didistribusikan ke setiap Unit Pelaksana Teknis (UPTD) di setiap kecamatan, pihaknya telah menerima beberapa jenis keberatan. Secara

detail berapa wajib pajak yang mengajukan keberatan belum dirinci.

Meski demikian, Susi menyebut kebanyakan wajib pajak keberatan atas kenaikan NJOP. Sedangkan, keberatan karena nilai pajak-nya naik dibandingkan tagihan pajak tahun terdahulu belum banyak yang masuk ke BKD. "Umumnya keberatan kenaikan NJOP dan keberatan PBB-nya naik belum banyak. Ini masih berproses paling lambat dalam seminggu ini sudah ada keputusan pengurangan pajak," jelasnya.

Sebelumnya, penyesuaian tarif NJOP tersebut meru-

pakan tindaklanjut dari perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2013, tentang PBB P2. Dalam penyesuaian itu, Pemkab Buleleng melalui Badan Keuangan Daerah (BKD), telah menyewa tim appraisal menghitung perubahan tarif NJOP PBB P2. Kini, penyesuaian tarif tersebut mulai diberlakukan untuk PBB P2 tahun 2019.

Data di BDK Buleleng menyebut, jumlah SPPT yang dicetak di tahun 2019 sebanyak 178.000 lembar. Jumlah tersebut telah didistribusikan ke masing-masing unit pelaksana teknis (UPT) di masing-masing

kecamatan, untuk diteruskan ke masing-masing WP. Nah setelah SPPT tersebar, WP mulai keberatan karena nilai pajak yang ditanggung kenaikannya cukup tinggi. Seorang warga mengaku, memiliki lahan seluas 1 hektare, dulunya hanya bayar pajak sebesar Rp 300.000, tetapi sekarang naik sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang dulunya hanya membayar sebesar Rp 3.800.000, kini harus membayar sebesar Rp 12.000.000. "Kalau naik pasti naik, tetapi kenaikannya sekarang sangat banyak. Saya sudah layangkan surat keberatan ke BKD," ungkapnya. **☎ k19**

Media :

Nusa Bali

Kategori :

APBD

Pembahasan LKPJ APBD 2018 Terancam

★ Wakil Rakyat Sibuk Selamatkan 'Kursi'

SINGARAJA, NusaBali

Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati atas pengelolaan APBD 2018, sedianya sudah mulai dibahas oleh anggota DPRD Buleleng di masing-masing Komisi, Senin (8/4). Nyatanya, agenda pembahasan hanya terlihat di Komisi III. Namun, pembahasan di Komisi III, hanya dihadiri oleh dua anggota Dewan dan satu dari tim ahli. Kabarnya, anggota Dewan saat ini lebih memilih konsentrasi menghadapi coblosan 17 April 2019.

Informasi dihimpun, Lembaga Dewan hanya memiliki waktu sebulan sejak LKPJ Bupati diterima, untuk mengeluarkan rekomendasi. Sesuai waktu, Lembaga Dewan sudah mengeluarkan rekomendasi paling lambat tanggal 26 April 2019 mendatang. Dalam pembahasan LKPJ Bupati tahun 2018, disepakati pembahasannya diserahkan kepada masing-masing Komisi sesuai bidang tugasnya.

Hasil pembahasan di masing-masing Komisi itu kemudian akan digodok lagi ditingkat rapat gabungan Komisi secara internal.

Hasilnya rapat gabungan Komisi itu akan ditindaklanjuti dengan mengundang eksekutif, sebelum keputusan nanti menjadi rujukan untuk mengeluarkan rekomendasi.

Nah, untuk pembahasan LKPJ ditingkat masing-masing Komisi, Senin kemarin, jumlah anggota Dewan yang hadir dapat dihitung dengan lima jari. Ini terlihat dimana jadwal pembahasan di Komisi III, hanya dihadiri oleh dua anggota yakni Putu Tirta Adnyana dari Fraksi Golkar dan Gede Suradnyana dari Fraksi Gerindra. Sedangkan di Komisi lainnya (I,II, dan IV,Red) tidak ada rapat pembahasan. "Karena anggota hadir dua orang saja, dan satu dari tim ahli, ya rapat tidak jadi. Kami hanya bincang-bincang saja," ungkap Putu Tirta Adnyana, politisi Golkar asal Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula.

Tirta Adnyana tidak menampik, saat ini seluruh anggota Dewan sedang sibuk turun ke masyarakat untuk mengamakan suaranya di Pemilu 17 April nanti. Apalagi seluruh anggota dewan nyalon, baik ditingkat DPRD

Kabupaten dan DPRD Provinsi. "Kami masih punya waktu (membahasnya, Red). Setelah pemilu, kalau dibahas marathon pasti selesai dalam waktu 4 hari, karena batas terakhir itu sampai tanggal 26 April untuk menerbitkan rekomendasi," jelasnya.

Meski demikian, Tirta Adnyana berharap seluruh anggota Dewan bisa hadir dalam pembahasan sesuai jadwal. Karena pembahasan LKPJ itu adalah tugas dan tanggungjawab seluruh anggota. "Ya semestinya memang hadir, bukan saya gimana. Mari kita bahas bersama, sambil belajar," ujarnya.

Sementara Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Buleleng, Dewa Ketut Manuaba menyatakan, penentuan jadwal pembahasan di masing-masing Komisi sepenuhnya dikembalikan kepada anggota Komisi. Karena pembahasan tersebut hanya melibatkan tim ahli. "Saya rasa, kami masih memiliki waktu yang cukup membahasnya. Nanti masing-masing Komisi yang menentukan jadwalnya sendiri, sehingga begitu mereka punya waktu, langsung dibahas," katanya. **k19**

Nama Media : *NUSA BALI*

Kategori : *Pendidikan*



• NUSABALI/ILUK

SISWA SMPN 2 Busungbiu yang tahun ini belum bisa mengikuti UNBK karena terkendala *blank spot* area.

SMPN 2 Busungbiu Belum Bisa UNBK

★ Terkendala Sinyal *Blank Spot*

SINGARAJA, NusaBali

Sebanyak 130 siswa SMPN 2 Busungbiu, tahun ini masih bertahan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP). Hal tersebut karena sekolah yang berlokasi di Desa Tista, Kecamatan Busungbiu ini masuk dalam areal *blank spot*. Keterbatasan dan ketidakstabilan sinyal internet membuat SMPN 2 Busungbiu tak dapat mengikuti UNBK.

Kepala SMPN 2 Busungbiu, Made Kariadi ditemui Senin (8/4) di sekolahnya menuturkan, pihaknya memang tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi tersebut. Bahkan SMPN 2 Busungbiu ini pun terpaksa batal menerima bantuan komputer dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dsdikpora) Buleleng karena sinyal internet tidak stabil.

"Kemarin (awal tahun) ke-

marin, sempat akan menerima bantuan komputer untuk UNBK, ruangan kami sudah disiapkan, tetapi setelah dilihat jaringan internetnya tidak memungkinkan jadi batal," ungkap Kariadi.

Kasek asal Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu itu pun menuturkan sejauh ini sekolahnya berharap banyak dapat mengikuti UNBK seperti sekolah lainnya, siswa kelas IX juga disebut mengikuti les komputer di sekitar sekolah secara pribadi untuk menyiapkan diri.

"Ya karena tidak ada sinyal tidak bisa berbuat apa. Kalau sinyal HP sih ada, itupun tidak stabil. Kalau dipakai di komputer yang jumlah banyak yang tidak bisa, kadang kami pakai modem kerjakan Dapodik, bisa tapi lelet dan perlu waktu lama. Kami sih

menunggu program pak Gubernur yang smart island itu, kalau itu sudah masuk kesini, terselesaikan sudah masalah ini," imbuh dia.

Kariadi pun menyebutkan hal itu merupakan satu-satunya jalan keluar, karena kalau meminjam fasilitas UNBK ke SMA/SMK terdekat juga tak memungkinkan. Dari SMPN 2 Busungbiu sekolah terdekat yang siap menyelenggarakan UNBK ada di SMAN 2 Busungbiu yang berjarak delapan kilometer. "Jaraknya jauh, kalau pun siswa sanggup di sana sudah ada SMPN 5 Busungbiu yang lebih dekat," jelas dia.

Sementara itu, Sekretaris Disdikpora Buleleng, Made Astika dikonfirmasi terpisah, memang tak menampik masih ada SMP di Buleleng yang mengalami *blank spot*. Selain SMPN 2 Busungbiu juga

terjadi di SMPN 3 Busungbiu yang berlokasi di Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Buleleng. Disdikpora Buleleng pun berencana akan berkoordinasi dengan Dinas Kominfo-Sandi terkait masalah tersebut. "Memang yang belum bisa UNBK tahun ini, selain kesiapan ruangan lab komputer juga ada yang masih *blank spot*, khususnya di daerah Busungbiu atas, kami sedang carikan solusi masalah itu," ucap Astika.

Sedangkan di tahun 2019, Ujian Nasional di jenjang SMP akan dilaksanakan pada tanggal 22-25 April mendatang. Dari 75 SMP Negeri dan Swasta dengan jumlah siswa yang akan mengikuti UN sebanyak 11.562 orang, 6.034 orang dari 48 sekolah akan mengikuti UNBK. Sedangkan sisanya 5.528 orang siswa dari 27 sekolah lainnya akan mengikuti UNKP. k23

Nama Media : **NUSA BALI**

Kategori : **Politik**

Hari Ini Sandiaga Uno Kampanye di Buleleng

SINGARAJA, NusaBali

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, Sandiaga Salahudin Uno, dijadwalkan menggelar kampanye akbar di Buleleng, Selasa (9/4) hari ini. Kampanye dipusatkan di Lapangan Bhuana Patra Singaraja, Jalan Udayana Singaraja, mulai pukul 08.30 Wita.

Ketua Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandi Kabupaten Buleleng, Jero Nyoman Ray Yusha mengatakan sudah merampungkan semua persiapan jelang kampanye akbar tersebut. "Semua sudah siap. Tinggal pelaksanaan saja. Hari ini (kemarin, red) kami tuntaskan semuanya," kata politisi asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan ini.

Lebih lanjut, Ray Yusha mengatakan, dalam kampanye itu sejumlah materi sudah disiapkan. Nantinya Sandiaga Uno juga akan mengajak seluruh



Sandiaga Uno

pendukungnya mendukung pemilu damai di Kabupaten Buleleng. "Kita juga akan kibarkan bendera merah putih. Bagi kami Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu harga mati. Kami akan dengungkan pemilu damai dari Buleleng bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya.

Selain itu Ray Yusha juga

menyatakan akan berupaya semaksimal mungkin memenangkan pasangan Prabowo-Sandi di Buleleng. "Tujuan kami sudah jelas memenangkan Prabowo-Sandi sebagai Presiden. Kami ingin Indonesia yang adil dan makmur," tegas pria yang juga Ketua DPC Gerindra Buleleng itu.

Sementara, Kasubbag Humas Polres Buleleng, Iptu Gede Sumarjaya mengatakan, aparat kepolisian akan menerjunkan sedikitnya 344 orang personel untuk mengamankan kampanye itu. Polisi akan melakukan pengamanan, mulai dari jalur yang akan dilintasi, maupun di sejumlah lokasi yang akan dijadikan lokasi kegiatan. "Sistem pengamanan yang kami lakukan itu sistem pengamanan terbuka. Kami sudah siapkan semua sesuai dengan SOP. Semua kemungkinan telah kami antisipasi," tegasnya. **k19**

Bule Belanda Resahkan Warga Petandakan

SINGARAJA, NusaBali

Perbekel Desa Petandakan, Kecamatan/Kabupaten Buleleng, Wayan Joni Arianto, didampingi warganya masadu ke Mapolsek Kota Singaraja, Senin (8/4) pagi. Mereka melaporkan seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Belanda yang tinggal sementara di wilayahnya, karena sering berulah dan ribut dengan warga setempat. Kelakuan WNA yang dinilai melewati batas itu juga membuat warga setempat ketakutan karena sempat mengancam dengan senjata api.

Menurut Perbekel Joni, WNA Johannes Franciscus Peters, 60, sudah dua tahun terakhir tinggal mengontrak di sebuah perumahan di wilayah Kawanan, Desa Petandakan, bersama teman wanita sekaligus penjaminnya Wayan Nita Marliana, 44. Peters dan penjaminnya selama ini hanya memegang Surat Keterangan Lapori Diri (SKDL) dari Pemerintah Desa Petandakan.

Namun sejak tinggal di Petandakan, Peters seringkali membuat ulah dan terlibat keributan dengan warga sekitar. Ia dituding sering membuat onar karena masalah sepele. "Kami dari desa sudah sering memfasilitasi dan memediasi kalau ada permasalahan dengan warga kami, sudah sempat juga buat surat pernyataan kalau berbuat onar lagi, bersedia kena risiko dan kemarin kejadian lagi keempat kalinya kami sepakat melaporkan ke polisi, untuk mendapat petunjuk lebih lanjut," ujar Joni.

Ulah Peters yang tidak diketahui pekerjaannya tapi disebut-sebut mengaku sebagai bekas petarung mix martial arts (MMA) ini sebelumnya juga disebut-sebut meresahkan warga Kubutambahan, Penarukan dan Pulau Obi dan Banyuning Selatan saat



PERBEKEL dan warga Desa Petandakan, Kecamatan/Kabupaten Buleleng masadu ke Mapolsek Kota Singaraja atas WNA yang sering bikin onar, Senin (8/4).

bermukim di wilayah tersebut. Joni selaku aparat desa pun sudah mempertimbangkan matang-matang tindakan pelaporan tersebut karena berurusan dengan WNA. "Kami lapor karena sudah berulang kali dan sudah melanggar perjanjian, takutnya warga kami yang geram tidak terkendali," imbuh Joni.

Seorang warga Jimmy Hendric Adwe yang mengaku bertetangga dan terlibat keributan terakhir dengan Peters pun sepakat bersama 10 KK warga yang tinggal di perumahan itu meminta desa mencarikan solusi. "Kemarin gara-gara musik, saya dicari dan diomeli dia. Padahal volume juga masih dalam batas kewajaran. Tidak hanya masalah musik saja, ada ibu-ibu masak sambil setel musik juga masalah sama dia, termasuk suara pabrik wine dan tetangga memanaskan mesin mobil di rumahnya, seperti ada kelainan WNA ini," jelas Jimmy.

Bahkan Peters pun disebut-sebut sempat melakukan pengancaman dengan menggunakan senpi, apakah asli atau tidak

belum diketahui secara jelas. Pelaporan WNA Peters di Mapolsek Kota Singaraja pun menghadirkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, I Gusti Agung Komang Artawan, mengaku akan menindak lanjuti pengecekan legalitas WNA Peters di Buleleng. "Kami akan cek data legalitas keberadaan mereka di Singaraja dulu, apakah ada izin di Indonesia sudah sesuai aturan. Kalau masalah pengancaman itu kami sarankan agar dilaporkan ke polisian saja," ungkap Artawan.

Sementara itu Kapolsek Kota Singaraja, Kopol AA Wiranata Kusuma, seizin Kapolres Buleleng, AKBP Suratno, mengaku akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat itu. Kapolsek Wiranata juga berjanji akan menggali informasi melalui penjaminnya. "Ya kalau begini sudah mengganggu Kamtibmas. Kami akan gali informasi dulu melalui penjaminnya karena pertimbangan bahasa juga. Termasuk mengecek informasi senpi yang dipakai mengancam warga," tegas Wiranata. © k23

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *NUSA BALI*

Kategori : *LAKALANTAS*

Bus Pariwisata Tabrak Tebing



BUS tabrak tebing di KM 22, jalur Singaraja-Denpasar wilayah Desa Pancasari, kecamatan Sukasada, Buleleng, Jumat (8/4).

SINGARAJA, NusaBali

Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di ruas jalan Singaraja-Denpasar via Bedugul, Senin (8/4) pukul 11.00 WITA. Sebuah bus pariwisata berwarna hijau bernomor polisi AG 7005 UV, yang dalam keadaan kosong

tidak berpenumpang diduga mengambil haluan terlalu ke kanan saat menikung di kilometer 22, wilayah Banjar Dinas Buyan, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada Buleleng, sebelum terjadi kecelakaan tunggal.

Peristiwa itu bermula saat bus pari-

wisata yang dikemudikan oleh Gede Suka Laksana, 49, warga Desa Mekar Sari, Kecamatan Putra Rumbia, Lampung Tengah, melaju dari arah Utara menuju Selatan. Bus tanpa penumpang itu pada kilometer 22 jalur Singaraja-Denpasar mendadak tak dapat dikendalikan. Laksana yang mengambil haluan terlalu ke kanan saat akan menikung ke kiri terpaksa menabrakkan bus yang dikemudikannya ke arah tebing di sisi Timur jalan.

Keputusan membanting stir itu pun dipilih Laksana untuk menghindari menabrak pengendara dari arah berlawanan. Beruntung Laksana hanya mengalami sedikit luka lecet. Bus pariwisata itu pun tak berselang lama langsung dievakuasi dengan kerusakan di bagian kiri depan dan samping.

Kasat Lantas Polres Buleleng, AKP Putu Diah Kurniawandari, dikonfirmasi terpisah membenarkan kejadian tersebut. Sementara ia menegaskan kecelakaan lalulintas itu diakibatkan karena *out off control*. "Hanya kerugian material sekitar Rp 15 juta saja, korban jiwa nihil dan kendaraan langsung dievakuasi," kata AKP Diah. **k23**